

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kelembagaan pendidikan non-formal di Indonesia memainkan peran yang vital dalam menyediakan akses pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Pendidikan non-formal mencakup berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang fleksibel dan adaptif, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kursus, dan pelatihan keterampilan. Meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, banyak PKBM masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan kelembagaan, kualitas program, serta sumber daya manusia dan finansial. Keterbatasan dalam kapasitas manajerial dan akses ke teknologi serta pelatihan profesional seringkali membatasi efektivitas dan dampak dari program-program pendidikan non-formal ini.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pendidikan non-formal, termasuk melalui program akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diterapkan untuk memastikan bahwa PKBM memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sementara sertifikasi untuk pengajar bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Seperti yang disampaikan oleh John Hattie (2019) menekankan bahwa akreditasi dan sertifikasi merupakan komponen kunci dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan. Hattie menunjukkan bahwa sistem akreditasi yang efektif dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga pendidik dapat secara signifikan mempengaruhi hasil belajar siswa, karena keduanya mendukung peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penelitian oleh Linda Darling-Hammond dan kolega (2020) dalam model "Professional Learning and Teacher Effectiveness" menegaskan pentingnya sertifikasi dan pengembangan profesional

dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Model ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur dapat meningkatkan kompetensi pengajar, yang berkontribusi pada hasil belajar siswa dan efektivitas lembaga pendidikan secara keseluruhan. Terakhir, model sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh Bhatia (2021) dalam *"Quality Management Systems in Education"* menggarisbawahi bagaimana akreditasi berfungsi sebagai alat untuk menetapkan dan memelihara standar kualitas yang jelas. Bhatia menyoroti bahwa sistem manajemen mutu yang baik, termasuk akreditasi dan sertifikasi, membantu lembaga pendidikan dalam memenuhi standar kualitas yang diperlukan dan berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah telah menyediakan kurikulum dan pedoman yang relevan serta melaksanakan pelatihan dan workshop untuk pengelola PKBM dan Tutor, fokus pada pengembangan keterampilan manajerial, penggunaan teknologi, dan metode pengajaran terbaru. Upaya ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dan akses teknologi melalui bantuan dana untuk renovasi gedung, pembelian peralatan, dan penyediaan perangkat teknologi, serta dorongan untuk kemitraan dengan sektor swasta guna meningkatkan dukungan finansial dan sumber daya.

Pemerintah juga mendukung pembentukan jaringan PKBM untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PKBM untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi dan dampak yang positif. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area perbaikan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan kapasitas kelembagaan PKBM dapat meningkat secara signifikan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menyediakan pendidikan non-formal yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat.

Di Jawa Barat, kondisi kelembagaan pendidikan non-formal menunjukkan perkembangan yang relatif positif dengan adanya peningkatan jumlah PKBM yang terakreditasi dan berbagai program pelatihan yang diselenggarakan. Namun, meskipun telah ada kemajuan, beberapa PKBM di wilayah ini masih menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan, pengelolaan

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sumber daya, dan implementasi program yang efektif. Upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengoptimalkan fungsi PKBM sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan non-formal dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat di Jawa Barat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memegang peranan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat komunitas. Di Kabupaten Karawang, telah tercatat sebanyak 53 PKBM yang telah mendapatkan akreditasi pada tahun 2022, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan pendidikan non-formal. Namun, meskipun beberapa PKBM telah terakreditasi, banyak dari mereka masih menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan program. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan inovatif dalam pendampingan sangat diperlukan agar PKBM dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pendidikan yang mereka berikan kepada masyarakat. Data tersebut divisualisasikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Mutu akreditasi satuan PKBM di Kabupaten Karawang

Status	F	%
A	2	3,77%
B	15	28,30%
C	18	33,96%
Belum Akreditasi	18	33,96%
Jumlah	53	100%

Sumber : <https://daftarsekolah.net> (2022)

Tabel 1 tentang mutu akreditasi satuan PKBM di Kabupaten Karawang data hasil akreditasi, tingkat pencapaian akreditasi yang meraih peringkat A sebanyak 2 Lembaga (3,77%). Yang memperoleh predikat B sebanyak 15 Lembaga (28,30%), selanjutnya yang meraih predikat C sebanyak 18 Lembaga (33,96%) dan yang belum diakreditasi 18 Lembaga (33,96%).

Data diatas menunjukkan bahwa mutu pkbm masih rendah yang memperoleh nilai mutu A jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang memperoleh nilai akreditasi B dan C. Hal ini menunjukkan tata kelola pkbm yang kurang baik dan perlu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendampingan

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

oleh para penilik di lingkungan Kabupaten Karawang.

Standar kelembagaan sebagaimana data mutu akreditasi, baik yang berkenaan tentang, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang belum baik. perlunya perbaikan kualitas dan relevansi program pembelajaran serta sistem manajemen mutu di PKBM. Perbedaan dalam akreditasi juga mengindikasikan adanya potensi kesenjangan dalam kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut, serta program pendampingan dan pemberdayaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas PKBM. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan perhatian dan dukungannya terhadap pengembangan PKBM di Kabupaten Karawang.

Peningkatan mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memerlukan kolaborasi yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Pemerintah daerah dan pusat memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan evaluasi terhadap PKBM, dengan Dinas Pendidikan Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan standar akreditasi (Senge, 2015). Menurut teori "*Learning Organization*" yang dikembangkan oleh Peter Senge, sistem manajemen yang efektif melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi antara berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Kepala PKBM dan staf pengajar memiliki tanggung jawab utama dalam implementasi program, manajemen kelembagaan, dan pengembangan kurikulum, dan mereka perlu terlibat dalam pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi (Hattie, 2019).

Lembaga akreditasi seperti Badan Akreditasi Nasional (BAN) memberikan sertifikasi yang menilai pemenuhan standar kualitas, dan penelitian oleh Darling-Hammond et al. (2020) dalam model "Professional Learning and Teacher Effectiveness" menegaskan bahwa sertifikasi dan pengembangan profesional yang terstruktur dapat meningkatkan kompetensi pengajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, sektor swasta dan dunia usaha dapat berkontribusi melalui kemitraan, penyediaan sumber daya, teknologi, dan pengalaman industri, yang

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sejalan dengan model sistem manajemen mutu Bhatia (2021) yang menekankan pentingnya standar kualitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Masyarakat dan pemangku kepentingan lokal memberikan umpan balik yang penting untuk memastikan bahwa program PKBM memenuhi kebutuhan lokal, sesuai dengan prinsip teori "Community Participation" yang diusulkan oleh Arnstein (1969). Akademisi dan peneliti dari universitas dapat menyediakan penelitian dan rekomendasi yang diperlukan untuk inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum, memperkuat sinergi antara teori dan praktik dalam pengembangan PKBM. Dengan melibatkan semua pihak ini secara efektif, kualitas PKBM dapat ditingkatkan secara signifikan, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi standar pendidikan non-formal yang tinggi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Di Kabupaten Karawang, penilik dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu kelembagaan. Penilik bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja PKBM, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pelatihan bagi pengelola PKBM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilik diharapkan dapat memastikan bahwa lembaga pendidikan non-formal, termasuk PKBM, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, prinsip "*Learning Organization*" dari Peter Senge (2015) menjadi sangat relevan. Senge menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan. Eric H. K. F. T. (2019) mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa pengembangan kapasitas melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja. Penilik, dalam hal ini, berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung pengelola PKBM dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari manajemen hingga implementasi kurikulum. Dengan adanya dukungan yang kuat dari penilik sesuai dengan peraturan pemerintah, PKBM di Karawang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilik di Karawang berupaya menerapkan prinsip ini dengan

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mendukung PKBM dalam proses perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan lokal. Pelatihan yang diberikan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola PKBM agar dapat mengelola lembaga secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, pengelola PKBM di Karawang telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menerapkan kurikulum yang relevan dan melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Mereka berusaha menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Namun, upaya ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan teknis, dan kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang lebih intensif bagi staf. Kendala-kendala ini mencerminkan kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan dukungan yang lebih kuat, sebagaimana dipaparkan oleh Hattie (2019) dalam model "*Visible Learning*" yang menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan dukungan dan sumber daya yang memadai.

Berbagai kendala signifikan berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan tugas-tugas ini. Keterbatasan waktu merupakan salah satu masalah utama, karena penilik sering harus menangani sejumlah besar PKBM di wilayah yang luas. Penelitian oleh McKinsey & Company (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan dukungan profesional dapat menghambat efektivitas penilaian dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan banyaknya lembaga yang harus dipantau, penilik sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan memberikan pendampingan yang menyeluruh kepada setiap PKBM.

Selain itu, penilik juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya, seperti akses ke alat evaluasi dan teknologi yang memadai. Penelitian oleh Khamis et al. (2022) menekankan pentingnya dukungan sumber daya yang memadai dalam sistem manajemen mutu. Di Karawang, keterbatasan dalam hal sumber daya dan teknologi menghambat kemampuan penilik untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memberikan dukungan yang efektif kepada

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengelola PKBM. Kurangnya alat evaluasi dan teknologi yang tepat menyebabkan penilaian yang kurang optimal, yang mempengaruhi kualitas pendampingan dan bimbingan yang diberikan.

Pengelola PKBM di Karawang berusaha keras untuk menerapkan kurikulum yang relevan dan memperbaiki infrastruktur, namun mereka menghadapi kendala besar seperti kekurangan dana dan keterbatasan teknologi. Penelitian oleh Rahardjo et al. (2021) menunjukkan bahwa kekurangan dana adalah masalah utama yang mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan non-formal, berdampak pada kemampuan pengelola untuk memperbaiki fasilitas dan membeli peralatan yang diperlukan. Keterbatasan teknologi juga menghalangi pengelola PKBM dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih efisien dan modern. Pengelola sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi yang dapat mendukung pembelajaran dan manajemen yang lebih baik.

Kendala-kendala yang dihadapi penilik dan pengelola PKBM menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan dukungan yang lebih kuat. Penelitian oleh Timperley (2018) menekankan pentingnya dukungan yang memadai untuk pengembangan profesional dan perbaikan sistem manajemen mutu dalam pendidikan. Timperley menggarisbawahi bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penting untuk memberikan dukungan yang memadai dan sistem manajemen mutu yang kuat. Dengan memberikan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan, teknologi, dan sumber daya yang memadai, baik penilik maupun pengelola PKBM akan lebih mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas PKBM di Kabupaten Karawang memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Penilik perlu mendapatkan dukungan dalam hal waktu dan sumber daya untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Pengelola PKBM juga memerlukan bantuan dalam mengatasi masalah keuangan dan teknologi, serta pelatihan manajerial untuk mengelola lembaga dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan yang memadai, PKBM di Karawang dapat lebih efektif dalam memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat yang lebih

besar bagi masyarakat.

Kondisi kelembagaan di Kabupaten Karawang menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal akreditasi PKBM, namun masih terdapat kesenjangan dalam kualitas dan pengelolaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan termasuk peningkatan pelatihan untuk pengelola PKBM serta penyediaan bantuan dana untuk renovasi dan perbaikan fasilitas. Penelitian oleh De Bruyckere et al. (2021) menggarisbawahi bahwa peningkatan kompetensi pengelola dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan. Mereka mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan integrasi antara pengembangan profesional dan dukungan infrastrukturnya. Namun, untuk mengatasi kendala yang ada secara efektif, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi yang melibatkan partisipasi aktif semua *stakeholder*, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

Strategi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan dalam kualitas PKBM melibatkan pendekatan sistem manajemen mutu yang komprehensif. Menurut Elmore (2018), sistem manajemen mutu dalam pendidikan harus melibatkan evaluasi yang berkelanjutan dan umpan balik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan penilaian yang rutin. Elmore menekankan pentingnya pengembangan kapasitas lembaga dan partisipasi *stakeholder* dalam perencanaan dan implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pendekatan pembelajaran informal, seperti yang dijelaskan oleh Coombs dan Ahmed (2021), juga dapat diterapkan dalam konteks PKBM untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Pembelajaran informal mengacu pada proses belajar yang terjadi di luar sistem pendidikan formal, yang dapat mencakup pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan kegiatan praktis. Coombs dan Ahmed mengemukakan bahwa integrasi pembelajaran informal dalam program pendidikan dapat membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik dan komunitas setempat, sehingga membuat proses pembelajaran lebih relevan dan kontekstual. Dalam konteks PKBM, penerapan prinsip pembelajaran informal dapat membantu pengelola PKBM dalam merancang program yang lebih responsif

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan keterlibatan peserta didik.

Untuk menerapkan strategi ini, PKBM di Kabupaten Karawang perlu fokus pada pembangunan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan fasilitas, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Dengan menerapkan strategi yang terintegrasi dan melibatkan semua *stakeholder*, serta memanfaatkan prinsip pembelajaran informal, PKBM dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan kelembagaan secara menyeluruh, upaya tersebut diimplementasikan dengan berbagai bentuk pembelajaran kolaboratif. Salah satu pendekatan efektif yang dilakukan melalui workshop dan seminar bersama, di mana penilik dan pengelola PKBM berkumpul untuk berbagi praktik terbaik dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Menurut Argyris dan Schön (2016), sesi seperti ini memfasilitasi "*double-loop learning*," yaitu proses belajar yang tidak hanya memperbaiki kesalahan tetapi juga mengubah pola pikir dan pendekatan manajerial. Dengan berbagi pengalaman dalam format ini, PKBM dapat memperluas pemahaman mereka tentang manajemen dan pengajaran, meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Program lainnya yaitu kunjungan dan observasi juga merupakan bentuk tukar belajar yang efektif, di mana pengelola PKBM mengunjungi lembaga lain untuk mengamati praktik yang diterapkan. Penelitian oleh Hargreaves dan Fullan (2012) menekankan bahwa observasi langsung dan pembelajaran dari praktik lapangan dapat mempercepat proses perubahan dan peningkatan kualitas. Kunjungan ini memungkinkan pengelola PKBM untuk mengidentifikasi praktik yang berhasil dan menerapkannya dalam konteks lokal mereka sendiri, selanjutnya terdapat Sesi mentoring dan pendampingan, di mana PKBM yang lebih maju membimbing PKBM yang baru berkembang, dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Menurut Kram (2021), mentoring adalah alat yang kuat untuk pengembangan profesional, memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan keterampilan. Dengan bimbingan langsung dari PKBM yang berpengalaman, pengelola PKBM yang lebih baru dapat memperoleh wawasan berharga dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk meningkatkan manajemen dan kualitas program mereka.

Pembentukan jaringan dan komunitas praktik juga menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kapasitas PKBM. Penelitian oleh Wenger, McDermott, dan Snyder (2002) menunjukkan bahwa komunitas praktik memfasilitasi pembelajaran sosial dan berbagi pengetahuan, yang dapat mempercepat pemecahan masalah dan inovasi. Jaringan ini menyediakan platform bagi PKBM untuk saling bertukar informasi dan dukungan secara berkelanjutan, menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Terakhir, program kolaborasi proyek di mana PKBM yang berbeda bekerja bersama untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum atau program baru juga merupakan strategi yang efektif. Menurut Johnson, Johnson, dan Smith (2014), kerja sama dalam proyek meningkatkan keterlibatan, memperkuat pembelajaran, dan memungkinkan integrasi berbagai keahlian. Dengan menggabungkan keahlian dari berbagai PKBM, proyek kolaboratif dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan relevan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Peneliti akan mengkaji konstruksi kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh penilik dan pengelola dengan fokus masalah mengenai strategi pembelajaran melalui tukar belajar (*Learning Exchange*) yang dilakukan kepada pengelola PKBM dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendekatan *Learning Exchange* dipilih karena dianggap lebih efektif dalam mendorong peningkatan kapasitas PKBM melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antar PKBM. sehingga menciptakan pembelajaran bersama yang memberdayakan dan berkelanjutan. Dengan demikian konstruksi model ini akan berguna bagi pengelola layanan pendidikan, dan dapat dikembangkan menjadi *rolemodel* dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan masyarakat melalui Model Pendampingan berbasis *Learning Exchange* dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kabupaten Karawang. Namun, efektivitas PKBM dalam menjalankan fungsinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada kelemahan dalam pendampingan dan kapasitas kelembagaan.

1. Pendampingan PKBM yang Kurang Optimal

Model pendampingan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM secara efektif. Pendampingan yang dilakukan masih bersifat umum, kurang spesifik terhadap kebutuhan masing-masing PKBM, dan belum sepenuhnya mendorong PKBM untuk menjadi subjek aktif dalam proses pengembangan kelembagaan. Di Kabupaten Karawang, pendampingan PKBM dilakukan berdasarkan pembagian wilayah, di mana setiap wilayah memiliki penilik yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang berbeda. Namun, pendampingan ini belum merata, karena setiap wilayah hanya mendapatkan pendampingan sesuai dengan kemampuan penilik masing-masing. Selain itu, Penilik tidak melakukan pendampingan secara bergilir ke semua wilayah, sehingga tidak semua PKBM mendapatkan pendampingan yang menyeluruh dan merata dari 3 kompetensi penilik yang dibutuhkan.

2. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan PKBM

Banyak PKBM di Kabupaten Karawang menghadapi tantangan dalam hal manajemen organisasi, perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta kemitraan. Kelemahan dalam aspek kelembagaan ini menghambat efektivitas PKBM dalam menyediakan pendidikan nonformal yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Kebutuhan Model Pendampingan yang Lebih Inovatif

Diperlukan sebuah pendekatan baru yang lebih inovatif, adaptif, dan

berkelanjutan dalam pendampingan PKBM. Pendekatan tersebut harus mampu menyesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing PKBM dan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

4. Kurangnya Implementasi Prinsip Learning Exchange dalam Pendampingan PKBM

Pendekatan Learning Exchange, yang menekankan pada proses saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran timbal balik antara penilik dan pengelola PKBM, belum dioptimalkan dalam pendampingan yang ada saat ini. Penerapan prinsip Learning Exchange dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pendampingan dan memberdayakan PKBM untuk berkembang secara mandiri

5. Urgensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Nonformal melalui Penguatan PKBM

Peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nonformal di Kabupaten Karawang. Dengan model pendampingan yang lebih efektif, PKBM dapat lebih optimal dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan nonformal di daerah tersebut.

Dari identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi PKBM di Kabupaten Karawang adalah kurangnya efektivitas pendampingan yang selama ini diterapkan, serta belum optimalnya implementasi prinsip Learning Exchange dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Pendampingan Berbasis Learning Exchange yang lebih inovatif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik PKBM di Kabupaten Karawang.

1.2.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada banyaknya faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, peneliti membatasinya dalam rumusan masalah penelitian, yaitu Bagaimana Model Pendampingan berbasis

Learning Exchange dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang ?

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana kondisi empiris kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang?
- 2 Bagaimana masalah dan harapan pengelola tentang kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM ?
- 3 Bagaimana konstruksi model pendampingan berbasis *Learning Exchange* dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, peneliti menyusun beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Mendeskripsikan kondisi empiris kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang
- 2 Mendeskripsikan masalah dan harapan pengelola tentang kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM
- 3 Mengonstruksi Model Pendampingan berbasis *Learning Exchange* meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

- 1 **Secara teoretis**, hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori pendidikan masyarakat, terutama dalam konteks model pendampingan berbasis *Learning Exchange*. Penelitian ini memperkuat landasan teoretis mengenai cara efektif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pembelajaran kolaboratif dan pertukaran pengalaman antar lembaga. Dengan demikian, temuan ini akan memperkaya

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

literatur akademik terkait strategi pengembangan kelembagaan pendidikan non- formal dan dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan masyarakat lainnya.

- 2 **Secara praktis**, penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan masyarakat lainnya di luar Kabupaten Karawang, seperti *homeschooling* dan sekolah alam. Model pendampingan berbasis *Learning Exchange* ini dapat dijadikan sebagai role model untuk pengembangan program pendampingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pada satuan pendidikan masyarakat. Selain itu, model ini juga dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga RW dan RT, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program-program pendidikan non-formal di wilayah mereka.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi disertasi merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2019, hlm. 21) dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi
2. Bab II Kajian Pustaka
Bab ini membahas kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian antara lain konsep pendidikan masyarakat, Konsep Teori Belajar Sosial, Konsep Heutagogi, Konsep Pendampingan, Konsep Pembelajaran Tukar Belajar, Konsep Pengelola, Penilik, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
3. Bab III Metode Penelitian
Bab ini membahas desain penelitian, lokasi dan tempat penelitian, pengembangan kisi-kisi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, studi dokumentasi, dan isu etik.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya

5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini yang dibahas adalah simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.